BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertambahan jumlah penduduk, peningkatan konsumsi masyarakat dan aktivitas kehidupan masyarakat di perkotaan, menyebabkan bertambahnya volume dan jenis sampah, serta karakteristik sampah yang semakin beragam. Sampah yang ditimbulkan dari aktivitas dan konsumsi masyarakat perkotaan ini, telah menjadi permasalahan lingkungan yang harus ditangani oleh setiap pemerintah kota dengan dukungan partisipasi aktif dari masyarakat perkotaan itu sendiri.

Kota Bandung sebagai ibu Kota Provinsi Jawa Barat yang dahulunya dikenal dengan ”Paris van Java” dengan lingkungannya yang asri sehingga pernah dijuluki sebagai Kota Kembang, namun karena menghadapi permasalahan sampah perkotaan maka dikhawatirkan status yang sudah baik ini menjadi hilang karena menumpuknya sampah diberbagai tempat yang antara lain disebabkan oleh terbatasnya daya tampung tempat pembuangan akhir (TPA).

Penanganan sampah di Kota Bandung memerlukan sistem manajemen yang baik dan mampu mengembangkan serta menerapkan paradigma manajemen sampah yang baru dan memiliki potensi yang akan menjadikan basis manajemen *modern*di kemudian hari, maka perencanaan dan pengambilan keputusan dalam penanganan sampah tidak saja Pemerintah Kota Bandung atau instansi lainnya yang terkait.Pengelolaan persampahan sering diprioritaskan penanganannya di daerah perkotaan.Pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lain perilaku dan

pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan timbulan sampah yang sangat membebani pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya, anggaran, sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan, oleh karena itu volume sampah yang ditimbulkan semakin meningkat pula, sehingga terjadilah penumpukan sampah serta volume sampah yang dapat di angkut dan di kelola tidak seimbang dengan volume produksi sampah. Penumpukan sampah tersebut tentunya mempunyai dampak yang negative terhadap lingkungan sekitarnya.

Peran masyarakat didalam menangani sampah di Kota Bandung diposisikan hanya sebagai objek sumber pendapatan. Sampah yang berasal dari rumah tangga dikelola oleh lembaga kewilayahan tingkat RW, kemudian dibawa ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang dikelola oleh Perusahaan Daerah.Sampah merupakan suatu tonggak baru bagi kebijakan pengelolaan sampah perkotaan di Kota Bandung yang mengarahkan kebijakan pengelolaan sampah perkotaan pada konsep dengan menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Daerah Kota Bandung dituntut untuk memformulasikan kebijakan pengelolaan sampah perkotaan dalam mengatasi permasalahan sampah khususnya sampah yang berasal dari rumah tangga dengan memberikan konstribusi terbesar (66%) penghasil sampah di Kota Bandung. Maka sampah Kota Bandung cenderung meningkat, sedangkan kategori lain adalah data jumlah timbulan sampah Kota Bandung berdasarkan sumber timbulannya, jumlah sampah terangkut, serta persentase pengangkutannya dapat dilihat bahwa persentase pengangkutan sampah di Kota Bandung rata-rata baru

mencapai 60%. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah merupakan suatu tonggak baru bagi kebijakan pengelolaan sampah perkotaan di Kota Bandung yang mengarahkan kebijakan pengelolaan sampah perkotaan dengan menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pada Peraturan Daerah No.12 Tahun 2010 dapat dilihat dimana proses kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung, sangat jelas bahwa dikatakan sistem pengelolaan sampah harus tertata dengan baik. Jika melihat dari kasus yang sekarang terjadi penumpukan sampah di pinggir jalan Kota Bandung maka kondisi bertolak belakang dengan yang di atur dalam Peraturan Daerah No.12 Tahun 2010. Salah satu Dinas yang berwenang dalam pengelolaan sampah ini adalah Dinas Permukiman Dan Perumahan Provinsi Jawa Barat yang terdapat pada Balai Pengelolaan Sampah Regional.BalaiPengelolaan Sampah Regional mempunyai tugas utama yaitu mengenai pengelolaan sampah di Kota Bandung dan mengenai pergantian TPA Leuwi Gajah ke TPA Sarimukti Cipatat yang terjadi di lapangan ternyata kapasitas penampungan sampah lebih kecil atau debit sampah yang lebih besar seiring bertambahanya penduduk di Kota Bandung semakin bertambah.

Sampah di Kota Bandung, akan menghadapi kendala apabila tidak adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat itu sendiri. Penanganan sampah di Kota Bandung memerlukan sistem manajemen yang baik dan mampu mengembangkan serta menerapkan paradigma manajemen sampah yang baru dan memiliki potensi yang akan menjadikan basis manajemen modern di kemudian hari, maka

perencanaan dan pengambilan keputusan dalam penanganan sampah tidak saja Pemerintah Kota Bandung atau instansi lainnya yang terkait. Berdasarkan tingginya beban penimbunan sampah pada Tahun 2012, volume timbulan sampah sebagai indikasi kualitas lingkungan hidup di Kota Bandung periode Tahun 2004-2011, setiap tahunnya menghasilkan rata-rata sebesar 1.369.659 m^3, dengan rata-rata pertambahan sebesar 17,29%/tahun atau sebesar 81.394 m^3/tahun, namun demikian volume sampah yang bisa diolah baru sekitar 10%. (http://www.junjunBandung.com, 10/05/2013).

Data dari Balai Pengelolaan sampah regional ini memperlihatkan pula bahwa setiap penduduk berpotensi menghasilkan sampah sekitar 3 liter per hari, sehingga dengan jumlah penduduk Kota Bandung sekitar 2,5 juta jiwa, beban sampah dapat mencapai sekitar 7.500 m^3/hari. Beban kualitas lingkungan hidup berupa sampah ini memiliki konstribusi terbesar utama berasal dari rumah tangga yaitu sekitar 66% atau 4.952 m^3. Kemudian sektor industri merupakan penghasil sampah yang memiliki konstribusi terbesar kedua dengan produksi sampah sekitar 798,50m^3/hari atau hampir 11%, dan sisanya sekitar 23% berasal dari pasar, sektor komersial, jalan, non komersial, serta sampah saluran.

Sumber permasalahan sampah selalu hadir, baik ditempat pembuangan sementara (TPS), tempat pembuangan akhir (TPA), maupun saat pendistribusiannya.Permasalahan yang muncul pada umumnya adalah system distribusi atau system Tempat Pembuangan Akhir (TPA).Sistem distribusi menyangkut masalah sarana transportasi pengangkut dan kendaraan yang mengangkut atau bongkar muat sampah dari rumah ke rumah, dari rumah ke

Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan dari TPS ke TPA Sarimukti, karena kenyataan di lapangan tidak seperti yang diharapkan yaitu hanya 1-2 rit/hari dikarenakan banyak kondisi truk dari PD kebersihan yang sudah tidak layak jalan disamping itu jumlahnya yang sangat minim, jumlah sarana alat transportasi yang dimiliki 103 truk dan yang melakukan operasi pengangkutanhanya 77 truk. Sedangkan sistem di TPA menyangkut pengelolaan sampah yang berkaitan dengan kecepatan daya tamping Tempat Pembuangan Akhir terhadap pertambahan jumlah sampah setiap harinya.

> Setelah terjadinya longsornya TPA Leuwi Gajah pada hari Senin tanggal 21 Februari 2005 dini hari, Ternyata musibah yang terjadi telah merenggut korban jiwa lebih dari 100 orang meninggal dunia. TPA Leuwi Gajah yang terletak di perbatasan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung menyisakan persoalan sampah di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Sampai sekarang memang masih meninggalkan banyak permasalahan karena penataan dan penanganannya belum maksimal, sehingga menimbulkan banyak penumpukan sampah di beberapa ruas jalan Kota/Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi. Dampak pencemaran udara ataupun air dari gunungan sampah sangat membahayakan karena menyebabkan timbulnya permasalahan lain bagi masyarakat Kota/Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi. (*http://www.itb.ac.id/news/trackback*/452, 28/03/2013).

Pengelolaan sampah dalam penanganan sampah yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan terbukti berjalan melalui pendekatan *service-profit-oriented* dan terintegrasi. Profesionalisme yang menjadi syarat berjalannya pendekatan melalui swastanisasi, dimana pemerintah baik pusat maupun daerah hanya berfungsi sebagai regulator, sedangkan pengelolaannya diserahkan ke swasta melalui mekanisme tender yang transparan untuk dijadikan pendapatan asli daerah. Perkembangan dan arah kebijakan dalam penanganan masalah sampah masih menjadi keprihatinan masyarakat khususnya di kota Bandung. Pola penyelesaian masalah sampah di kota Bandung masih bersifat sementara dan

setiap tahun memerlukan biaya yang sangat besar dengan target penyelesaiannya yang masih bersifat teoritis tanpa arah keberlanjutan yang jelas dan kurang menyentuh pada pola hidup masyarakat.

Untuk menunjang penanganan sampah yang relevan dengan sisi ekonomi dan ekologi maka diperlukan penanganan sampah secara terpadu (*integrated waste management*) yaitu penanganan sampah perkotaan menunjukan bahwa beberapa kegiatan perlu dilakukan untuk mengatasi tingginya pertambahan penduduk dan arus urbanisasi ke perkotaan yang menyebabkan semakin tingginya volume sampah, ditambah keterbatasan lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, pengangkutan sampah ke TPA yang terkendala karena jumlah kendaraan yang tidak mencukupi dan kondisi peralatan yang telah tua serta pengelolaan TPA yang tidak sesuai dan sudah tidak ramah lingkungan.

Dengan demikian, dalam masalah sampah bukan hanya menjadi urusan Pemerintah Kota Bandung dan instansi lainnya, karena dalam penyelesaian penanganan sampah tersebut membutuhkan keterlibatan semua pihak terkait di Kota Bandung. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil dengan judul**"Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Regional di Kota Bandung".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam usulan penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah regionaldi Kota Bandung ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana Implementasi Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung, adapun tujuan dari usulan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui komunikasi Balai Pengelolaan Sampah Regionaldi Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui sumber daya (*resources*) Balai Pengelolaan Sampah Regionaldi Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Disposisi/sikap (*disposition*) Balai Pengelolaan Sampah Regional di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*) yang terjadi pada Balai Pengelolaan Sampah Regional di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat bermanfaat baik untuk diri sendiri dan umumnya untuk orang lain. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
   a. Dapat menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik khususnya tentang implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah.

b. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti untuk menambah pengetahuan umum tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah regional di Kota Bandung. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi masukan atau referensi mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah regional di Kota Bandung.

2. Secara Praktis

a. Bagi pemerintah daerah, dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan membantu dalam pengambilan keputusan serta bermanfaat bagi perkembangan pemerintah daerah tersebut. Serta dapat mengetahui permasalahan yang terjadi terutama tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah regional di Kota Bandung ataupun permasalahan lainnya. Selain itu dapat menjadikan bahan masukan untuk mencari jalan keluar dalam memecahkan masalah yang terjadi dan mengatasi serta memperbaiki hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan sampah regional di Kota Bandung.

b. Bagi masyarakat, diharapkan nantinya dapat membuka ruang untuk kesadaran dalam ikut serta menangani pengelolaan sampah yang sedang berjalan.

c. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasaan serta pengetahuan mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah regional di Kota Bandung. Selain itu penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan skripsi.